

Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

Wiranti R. Bakri^a, Golar^b, Arman Maiwa^c, Hamzari^d, Sudirman Dg Masirri^e, Abdul Rahman^f, Mochamad Fadil^g
^{abcde f g} Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Tondo, Palu – Sulteng, Indonesia

*Correspondence: wirantibakri27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 03 Februari 2024

Received in revised form 10 Februari 2024

Accepted 12 Februari 2024

DOI:

<https://doi.org/10.32938/sc.v9i01.2426>

Keywords:

Pemangku Kepentingan
Rehabilitasi Hutan
Daerah Aliran Sungai.

Abstrak

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dibanyak lokasi di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian. Meningkatnya tekanan dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, menyusutnya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meluasnya kawasan kritis dan pembangunan wilayah yang telah menyebabkan peningkatan risiko banjir tanah longsor dan kekeringan. Kondisi serupa juga terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan daerah aliran sungai (DAS) Desa Beka. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling untuk mengetahui peran pemangku kepentingan serta analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dilakukan melalui interpretasi matriks pengaruh dan kepentingan pengelolaan rehabilitasi hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengidentifikasi 9 pemangku kepentingan yang memiliki peran mulai dari pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan mengidentifikasi peran pemangku kepentingan, analisis 4Rs dan menilai tingkat pengaruh kepentingannya, terlihat bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama mencapai tujuan pengelolaan rehabilitasi hutan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sinergi antara berbagai pihak seperti BPDAS Palu Poso, dan KPH Kulawi memberikan landasan yang kokoh bagi optimalisasi potensi pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Beka.

1. Pendahuluan

Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008). Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebagian dari wilayah daratan yang mencakup air dan sumber daya alam yang harus dilindungi, diatur, dikuasai, dan dikelola oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DAS adalah kegiatan manusia dalam mengelola hubungan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia di DAS di Desa Beka, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan keseimbangan ekosistem dan peningkatan manfaat berkelanjutan yang diperoleh manusia dari sumber daya alam ([Aryani et al., 2020](#)).

Kerusakan DAS di banyak lokasi di wilayah Indonesia perlu mendapat perhatian. Meningkatnya desakan dari pertumbuhan penduduk urbanisasi yang menyebabkan menyusutnya DAS, dan meluasnya kawasan kritis dan menyebabkan peningkatan risiko banjir, tanah longsor dan kekeringan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mursalim et al., 2019) kondisi serupa juga terjadi di DAS Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. ([Alviya et al., 2016](#)), menyusutnya daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai disebabkan lemahnya pemangku kepentingan dalam menjalin hubungan kerjasama dalam pengelolaan DAS.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan kawasan hutan, termasuk daerah aliran sungai ([Maiwa et al., 2018](#)). Selain itu, peran pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan regulasi dalam pengelolaan wilayah yang berkelanjutan ([Rahman et al., 2024](#)). Segala regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS perlu diatur dengan jelas sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan DAS di Indonesia, sehingga peran pemangku kepentingan dapat berjalan secara optimal. ([Damanik et al., 2022](#)).

(Parera et al., 2022) perlunya tata kelola pemangku kepentingan yang efektif dalam manajemen sumber daya alam untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS. Konsep manajemen pemangku kepentingan adalah pengelolaan berbagai pihak secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Sehingga dalam pengembangan pengelolaan DAS diperlukan pengaturan peran pemangku kepentingan untuk pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif dan kolaboratif (Hasnanda et al., 2018).

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Desa Beka Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan September sampai bulan Desember 2023.

Pengambilan sampel dilakukan melalui pendekatan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan gambaran holistik dan didasarkan pada pertimbangan atau kriteria khusus (Ariska et al., 2020). Metode *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci atau pemangku kepentingan otoritas terkait pengelolaan DAS di Desa Beka. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik atau metode mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel suatu jaringan atau rantai hubungan yang berjalan dari satu sumber ke sumber lainnya untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan pihak lain yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi tertentu dalam upaya pengelolaan rehabilitasi hutan DAS di Desa Beka. (R. K. Hidayat et al., 2021).

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini mencakup kuesioner dan perangkat perekam. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang digunakan memuat informasi mengenai identitas responden, tugas pokok dan fungsinya, serta kontribusinya dalam pengelolaan rehabilitasi hutan DAS. (Parera et al., 2022).

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metodologi 4R (*Right, Responsibility, Revenue, dan Relationship*) dalam kaitannya dengan pengelolaan rehabilitasi hutan daerah aliran sungai. Melalui analisis tersebut, peran kepentingan dihadirkan melalui empat aspek yaitu hak, tanggungjawab, manfaat dan hubungan yang dapat dilihat pada Tabel. 1 sebagai berikut

Tabel. 1 Analisis 4Rs

Pemangku kepentingan (Stakeholders)	Hak (Right)	Tanggung Jawab (Responsibilities)	Manfaat (Revenues)	Hubungan (Relationships)

Analisis 4Rs disusun melalui interpretasi matriks pengaruh serta kepentingan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai. Dengan mempertimbangkan pernyataan para pemangku kepentingan dikelompokkan berdasarkan kriteria dan indikator pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009). Selanjutnya analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan di DAS Desa Beka dilakukan melalui interpretasi matriks kepentingan dan pengaruh. Matriks ini dibuat dengan menggunakan bantuan *Microsoft Excell*. Hasil penentuan nilai atau angka masing-masing indikator dibandingkan satu sama lain dan dibuat koordinat yang memberikan informasi mengenai peran dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada (Maiwa et al., 2023) penentuan skor dapat di lihat pada Tabel. 2

Tabel. 2 Ukuran Kuantitatif

No	Skor Nilai	Kriteria	Keterangan
Kepentingan pemangku kepentingan			
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan hutan DAS
2	6-10	Kurang tinggi	Kurang mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan DAS
3	11-15	Cukup tinggi	Cukup mendukung pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
4	16-20	Tinggi	Mendukung pengelolaan rehabilitasi pengelolaan DAS
5	21-25	Sangat tinggi	Sangat mendukung pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
Pengaruh pemangku kepentingan			
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
2	6-10	Kurang tinggi	Kurang mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS

3	11-15	Cukup tinggi	Cukup mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DA
4	16-20	Tinggi	Mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS
5	21-25	Sangat tinggi	Sangat mempengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan DAS

Tabel 2. Ukuran kualitatif terhadap pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan

Posisi kuadran dapat mengilustrasikan posisi dan peran yang dimainkan oleh setiap pemangku kepentingan terkait pengelolaan rehabilitasi hutan DAS dan dikategorikan sebagai berikut :

1. *Key players*, adalah pemangku kepentingan kunci karena memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi terhadap perkembangan pengelolaan DAS di Desa Beka
2. *Context setters*, memiliki dampak yang signifikan karena memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, meskipun memiliki sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka perlu dimonitor secara cermat sebagai risiko potensia.
3. *Subjects*, merupakan pihak yang memiliki kepentingan tinggi. Namun, pengaruhnya terbatas, dalam pengelolaan DAS di Desa Beka.
4. *Crowd*, adalah pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terbatas pengelolaan DAS di Desa Beka. Meskipun demikian, pertimbangan perlu diberikan terhadap partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan penelusuran deskriptif terhadap keterkaitan pemangku kepentingan, yang diilustrasikan melalui matriks.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Identifikasi Peran Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang mempunyai pengaruh dan kepentingan serta dapat mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap pemangku kepentingan lainnya (Dian, 2022). Merujuk hasil analisis, terdapat 9 para pemangku kepentingan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan didaerah tangkapan air Desa Beka. Daftar pemangku kepentingan dibuat dengan menggunakan metode *snowball sampling*, dimana pemilihan responden didasarkan pada informasi dari pemangku kepentingan lainnya (*key information*). Tergantung pada peran dan fungsinya masing-masing, para pemangku kepentingan tersebut menjalankan peran yang berbeda-beda.

Langkah dasar dalam analisis pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan, ini menjadi kunci penting untuk memahami secara mendalam keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan rehabilitasi hutan dan DAS.

Hasil identifikasi pemangku kepentingan, ditemukan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS di Desa Beka memiliki peran yang berbeda yang menjadi kekuatan dalam upaya optimalisasi pengelolaan rehabilitasi hutan. BPDAS Palu Poso sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki tanggungjawab utama dalam mengelola rehabilitasi hutan. Peran BPDAS mencakup aspek perencanaan, pengembangan model pengelolaan, hingga pengembangan kelembagaan dan kemitraan DAS secara menyeluruh. Selain itu, terlihat bahwa BPDAS Palu Poso memiliki tanggungjawab yang luas dan menyeluruh dalam pengelolaan DAS di Sulawesi Tengah. Pada tingkat provinsi, DLHD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas sesuai dengan wilayahnya. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara unit-unit terkait dalam rangka mendukung keseluruhan proses pengelolaan rehabilitasi hutan DAS (Muis et al., 2024). Para pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dan fungsi pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3 Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

No.	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Peran
1.	BPDAS Palu Poso	Melakukan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan rehabilitasi hutan
2.	DLHD	Melakukan regulasi terhadap struktur dan fungsionalitas lingkungan melalui koordinasi serta perbaikan integrasi dalam perencanaan, kontrol, dan penilaian dalam administrasi lingkungan hidup terhadap kapasitas dan daya dukung ekosistem
3.	KPH Kulawi	Pelaksana teknis di tingkat tapak dan perlindungan hutan dan sumberdaya hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pengamanan hutan, pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan perizinan dan kerja sama kehutanan
4.	Babinsa	Melakukan pengawasan, keamanan pendampingan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan dalam situasi darurat
5.	Bhabinkamtibnas	Melakukan pengawasan, keamanan, pendampingan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan dalam situasi darurat
6.	Pemerintah Desa Beka	Melakukan perencanaan, pengawasan, penanganan, monitoring dan evaluasi dan pengembangan
7.	Tokoh Adat	Pembimbingan dan penjaga tradisi serta mediator
8.	KTH	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan
9.	Masyarakat Desa Beka	Mengaja lingkungan, melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas

3.2 Analisis 4Rs pada Pemangku Kepentingan

Analisis 4Rs ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan dengan maksud memahami posisi, pengaruh dan kepentingan mereka (Damayanti et al., 2020). Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pemangku kepentingan mana yang memiliki potensi lebih besar dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan diantara banyak pemangku kepentingan yang ada. Salah satu metode yang digunakan untuk memahami karakteristik pihak-pihak tersebut adalah melalui analisis kekuatan mereka, yang bertujuan menjelaskan peran, sifat dan hubungan yang berbeda diantara mereka.

Partisipasi pemangku kepentingan yang terlibat juga memiliki peran yang signifikan, sehingga dapat terlihat adanya kesamaan pandangan dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian fungsi hutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait sinergi antara pemangku kepentingan dalam upaya mengelola rehabilitasi hutan di DAS Desa Beka (Fibriantingtyas, 2020).

Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya atau hasil dari suatu organisasi, atau yang dipengaruhi oleh hasil tersebut (Fitri Mutmainah & Katon Mahendra, 2019). Keterlibatan pemangku kepentingan memiliki dampak yang signifikan pada proses perencanaan pengelolaan atau aspek-aspek terkait suatu program. Pendekatan dan analisis pemangku kepentingan dilakukan berdasarkan kerangka 4Rs. Pendekatan ini dikembangkan sebagai alat evaluasi untuk menilai peran dan kekuatan masing-masing pemangku kepentingan, dengan tujuan meningkatkan kerjasama dalam konteks perencanaan dan pengelolaan.

Dalam pemahaman pengelolaan rehabilitasi hutan, digunakan analisis peran dengan kerangka analisis 4Rs, yaitu *Right* (Hak), *Responsibility* (Tanggung jawab), *Revenue* (manfaat), dan *Relationship* (Hubungan). Metode analisis ini bermanfaat untuk merinci dan mengembangkan peran-peran para pemangku kepentingan yang terlibat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa langkah-langkah analisis ini perlu dilakukan untuk menginternalisasi dan memperkuat peluang kemitraan dengan aspek-aspek hak masyarakat (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), manfaat (*revenue*), dan hubungan atau relasi (*relationship*).

Analisis 4Rs merupakan analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran yang dimainkan oleh berbagai pihak dan sifat hubungan diantara mereka. Kerangka 4Rs membongkar peran dari pihak-pihak yang terlibat ke dalam aspek hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), manfaat (*revenue*), dan hubungan (*relationship*) diantara para pihak terlibat (Damayanti et al., 2020).

Dalam analisis ini, diuraikan apa saja hak, tanggungjawab, manfaat dan dinamika hubungan yang diterima oleh masing-masing pihak serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan peran mereka untuk menjelaskan kondisi peran dan dinamika hubungan yang terjalin. Pemberian skor dilakukan untuk menilai sejauh mana peran para pihak dalam implementasi kerja sama pengelolaan rehabilitasi hutan.

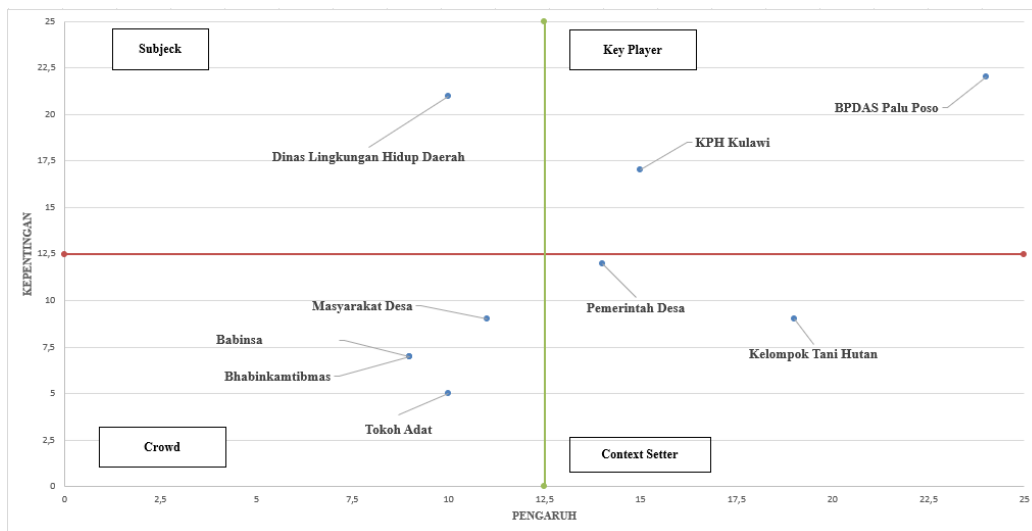
Tabel. 3 Analisis Pemangku Kepentingan menggunakan pendekatan 4Rs

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	HAK	KEWAJIBAN	MANFAAT	JALINAN HUBUNGAN
1	BPDAS Palu Poso	Pendanaan, monitoring dan bimbingan teknis pengelolaan SDH	Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian pelaksanaan kegiatan, pendataan sumber daya	Pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan	Seluruh pemangku kepentingan
2	DLHD	Pemantauan, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan kerusakan lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup, kolaborasi, penanganan bencana lingkungan	Pembinaan, pengembangan kapasitas masyarakat dan wilayah	Seluruh pemangku kepentingan
3	KPH Kulawi	Pengawasan dan pembinaan, pendampingan teknis dan penentuan kebijakan	Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi DAS	Terciptanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya lahan kritis	Seluruh pemangku kepentingan
4	Babinsa	Pengawasan, pengaturan, pengamanan kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat	Pembinaan pertahanan dan keamanan, pemantauan kondisi wilayah, koordinasi dengan pihak terkait, penyuluhan dan edukasi, pengabdian kepada Masyarakat	Perlindungan lingkungan peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur	Pemerintah Desa Beka, Tokoh Adat, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Desa Beka
5	Bhabinkamtibnas	Pengawasan, pengaturan, pengamanan, kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat	Pembinaan pertahanan dan keamanan, pemantauan kondisi wilayah, koordinasi dengan pihak terkait, penyuluhan dan edukasi, pengabdian kepada masyarakat	Perlindungan lingkungan peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur	Pemerintah Desa Beka, Tokoh Adat, Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Desa Beka
6	Pemerintah Desa Beka	Pengawasan pengelolaan hutan, penanganan,	Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan	Perlindungan lingkungan, peningkatan	Seluruh pemangku kepentingan

		koordinasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pendapatan pajak	berkelanjutan, dan pendampingan pemangku kepentingan	pendapatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur	
7	Tokoh Adat	Pemeliharaan budaya dan tradisi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan	Pengawasan budaya local, adukasi pengetahuan budaya lokal, dan kolaborasi dengan pihak terkait	Budaya lokal terpelihara	Pemerintah Desa Beka, DLHD
8	KTH	Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDH	Pemeliharaan kawasan hutan, pelatihan dan pendampingan	Pendapatan tambahan, pemberdayaan ekonomi dan kawasan hutan terjaga	BPDAS Palu Poso, KPH Kulawi, Pemerintah Desa Beka, Masyarakat Desa Beka
9	Masyarakat Desa	Mengelola kawasan dan melestarikan	Pemeliharaan kawasan hutan, partisipasi dalam perencanaan	Peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, kawasan hutan terjaga	Pemerintah Desa Beka

3.3 Tingkat Pengaruh dan Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengkategorikan pemangku kepentingan tersebut menurut kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) yang dapat ditentukan dengan membuat kriteria penilaian kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) (Kutlu, 2023).



Gambar. 1 Diagram Pengaruh dan Kepentingan

Hasil identifikasi yang dilakukan melalui matriks tingkat pengaruh dan kepentingan setiap pemangku kepentingan selanjutnya disajikan dalam Gambar 1. N. C. [Hidayat et al., \(2020\)](#) menyatakan bahwa pengelompokan atau kategorisasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh ([Ackermann & Eden, 2011](#)). Dalam metode ini, pemangku kepentingan dikelompokkan dalam empat kuadran yaitu *key players*, *context setter*, *subject*, dan *crowd*.

1. *Key players*, merupakan salah satu kategori pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Pemangku kepentingan ini terdiri dari BPDAS Palu Poso dan KPH Kulawi. BPDAS Palu Poso memiliki peran utama dalam kegiatan pengelolaan rehabilitasi hutan ([Mursalim et al., 2019](#)). BPDAS Palu Poso memiliki kepentingan tinggi dalam melaksanakan program rehabilitasi hutan. Pengaruh BPDAS Palu Poso sangat signifikan karena bertanggungjawab langsung atas operasional dan pelaksanaan pengelolaan rehabilitasi hutan. KPH Kulawi juga memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Keberadaan KPH Kulawi memberikan dukungan kebijakan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi pengelolaan rehabilitasi hutan. Peran kebijakan mereka dapat berdampak langsung pada pengelolaan rehabilitasi dan pelestarian hutan ([Martuti et al., 2018](#)).
2. *Subject*, adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang rendah namun memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap pengelolaan rehabilitasi hutan. Terdapat satu pemangku kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, sedangkan pengaruhnya rendah, yaitu Dinas Lingkungan Daerah (DLHD). Pemangku kepentingan ini memiliki nilai yang sangat signifikan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan, meskipun memiliki pengaruh yang rendah dalam proses tersebut ([Setijaningrum, 2020](#)).
3. *Context setter*, adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang besar namun memiliki derajat kepentingan yang rendah dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Beberapa pemangku kepentingan yang termasuk dalam kategori *context setter* adalah pemerintah desa beka dan kelompok tani hutan. Pemangku kepentingan yang termasuk dalam *context setter* adalah para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki tingkat kepentingan yang terbatas dalam menentukan arah pengelolaan rehabilitasi hutan ([Jimmy Enmo, 2023](#)).
4. *Crowd*, adalah kategori pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah dalam pengelolaan rehabilitasi hutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat pemangku kepentingan yang termasuk dalam kelompok *crowd*, yaitu babinsa, bhabinkamtibnas, tokoh adat dan masyarakat desa. Keempat kelompok ini tidak memiliki peran yang substansi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan terkait manajemen rehabilitasi hutan. Meskipun mereka tidak memberikan kontribusi yang signifikan, namun kelompok ini dapat memberikan informasi atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan rehabilitasi hutan ([Mondolu et al., 2023](#)).

4. Simpulan

Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) telah mengidentifikasi 9 pemangku kepentingan yang memiliki peran mulai dari pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Dengan mendefinisikan peran pemangku kepentingan, analisis 4Rs dan menilai tingkat pengaruh dan kepentingannya, terlihat bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama mencapai tujuan pengelolaan rehabilitasi hutan DAS. Sinergi antara berbagai pihak seperti BPDAS Palu Poso, KPH Kulawi dan Pemerintah Desa memberikan landasan yang kokoh bagi optimalisasi potensi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pustaka

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/J.LRP.2010.08.001>
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., Zahrul Muttaqin Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, M., & dan Perubahan Iklim Jl Gunung Batu No, K. (2016). Enhancing the Role of Stakeholders in the Management of Upstream Ciliwung Watershed. In *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* (Vol. 13, Issue 2).
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Aryani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592–614. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8>

- Damanik, R. K., Sinaga, T. R., & Sipayung, A. D. (2022). Manajemen Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai Wampu Kabupaten Langkat. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 3, 1–6. <https://core.ac.uk/download/pdf/551556896.pdf>
- Damayanti, T., Wahid, A., & Massiri, S. D. (2020). Peran para pihak Dalam Mendukung Kemitraan Pemanfaatan Rotan Di KPH Dolago Tanggunung Desa Jono Kalora. *J.ForestSains*, 17(2), 61–66.
- Dian, Y. K. (2022). No Title. *Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Baning Sintang Kalimantan Barat*, 1 (2): 440, 1–15. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jlht/article/view/61820/75676596218>
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.*, 3.
- Fibrianingtyas, A. (2020). Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Kelestarian Hutan Kawasan UB Forest. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 4(4), 1–23.
- Fitri Mutmainah, N., & Katon Mahendra, G. (2019). Collaborative Governance Program GenRe Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Remaja Terhadap Kesehatan Reproduksi di Provinsi DIY. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.01.1>
- Hasnanda, O. K., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Santoso, N. (2018). Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in Region 3 of Aceh Province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(3), 156.
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Hidayat, R. K., Makhruh, M., & Darmawan, M. I. (2021). Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) FKIP Universitas Mataram Bidang Studi Pendidikan Fisika di MAN 1 Lombok Timur. *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Fisika Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/jppfi.v3i1.115>
- Jimmy Enmo, S. S. (2023). *ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN*.
- Kutlu, T. (2023). No Titleการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย*, 4(1), 88–100.
- Maiwa, A., Rahman, A., Pribadi, H., Hamka, H., Baharuddin, R. F., & Jordan, G. (2023). The Role of Stakeholders in Natural Tourism Management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi. *Jurnal Penelitian Kehutanan BONITA*, 5(2), 28–37.
- Maiwa, A., Umar, S., Golar, & Abdul Rahman. (2018). Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*, 6(2), 47–54.
- Martuti, N. K. T., Susilowati, S. M. E., Sidiq, W., & Mutiatari, D. P. (2018). Peran kelompok masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 100–114.
- Mondolu, S. E., Nau, N. U. W., & Seba, R. C. (2023). Kerjasama Indonesia-Jerman Dalam Pelestarian Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Melalui Forest Programme III Sulawesi Tahun 2018-2022. *Administratus*, 7(2), 130–145.
- Muis, H., Rahman, A., Maiwa, A., Fitrah, R., Pribadi, H., & Paulus, S. (2024). Land Cover Change of Kawatuna Sub-Watershed in Central Sulawesi. *2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments 2022 Environment and Sustainable Development (ICESSD-ESD-22)*, 66–70.
- Mursalim, Akhbar, & Muis, H. (2019). Analisis keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Sub DAS Miu. *Jurnal Mitra Sains*, 7(1), 11–21.
- Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. (2022). Identifikasi Pemangku Kepentingan Dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), 34–43. <https://doi.org/10.30598/10.30598.jhppk.2022.6.1.34>
- Rahman, A., Maiwa, A., Sangadji, M. N., Kurniawan, M., & Musbah, M. (2024). Stakeholders Involved in Strategic Environmental Assessment Planning in Central Sulawesi. *2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments 2022 Environment and Sustainable Development (ICESSD-ESD-22)*, 17–21.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2009.01.001>
- Setijaningrum, E. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201.